

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam perekonomian modern manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *agency theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (agen) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang lebih efisien dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Mereka bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini mereka berperan sebagai *agents* pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola maka semakin besar pula keuntungan yang di dapat oleh *agents*. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen

untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan (Adrian Sutedi, 2012: 13).

Agency theory menjelaskan tentang hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih prinsipal menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang untuk membuat keputusan kepada agen. Adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan tersebut menyebabkan manajemen bertindak tidak sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*). Konflik ini terjadi karena agen tidak bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (prinsipal), tetapi mempunyai kecenderungan untuk menguntungkan kepentingan individu agen dengan mengorbankan kepentingan perusahaan (Jansen dan Meckling dalam Winanto dan Widiyat, 2013).

Untuk mengatasi terjadinya konflik tersebut harus ada tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan sehingga memberikan keyakinan dan kepercayaan pemilik terhadap manajer bahwa mereka mampu memanfaatkan seluruh sumber daya secara maksimal sehingga *earning power* perusahaan dapat meningkat.

Teori keagenan (*agency theory*) mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik (pemegang saham) sebagai prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan

pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Dikaitkan dengan peningkatan manajemen laba, ketika terdapat asimetri informasi manajer dapat memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada investor guna memaksimalkan manajemen laba. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi.

2.1.2 Ukuran Perusahaan

2.1.2.1 Definisi Perusahaan

Menurut Nanu Hasanuh (2011: 2), perusahaan adalah: "... wadah atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama pendirinya dengan melakukan kegiatan ekonomis yaitu memproduksi barang dan jasa dalam suatu masyarakat".

Menurut Hery (2016: 2), perusahaan adalah: "... sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk (barang atau jasa) kepada para pelanggannya".

Menurut Alexandria (2009: 2), perusahaan adalah: "... unit kegiatan ekonomi yang dikelola dan dijalankan dengan cara mengubah sumber daya ekonomi menjadi produk dan jasa untuk kebutuhan masyarakat untuk memperoleh laba atau keuntungan".

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan adalah suatu tempat organisasi yang di dalamnya terdapat aktivitas produksi yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Perusahaan

Menurut Rudianto (2013: 15), dilihat dari bidang usaha yang digeluti dan produk yang dihasilkan, perusahaan dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Perusahaan Jasa yaitu perusahaan yang produknya adalah yang bersifat nonfisik, seperti perusahaan transportasi, biro wisata, bioskop, konsultan, akuntan, dan sebagainya.
2. Perusahaan Dagang yaitu perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjual kepada pihak yang membutuhkan/konsumen, sebagai contoh: pasar swalayan, distributor elektronik, dan sebagainya.
3. Perusahaan Manufaktur yaitu perusahaan yang membeli bahan baku mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai. Sebagai contoh: produsen mie instant mengolah tepung terigu hingga menjadi mie instant serta produsen pakaian mengolah kain menjadi kemeja.

2.1.2.3 Definisi Ukuran Perusahaan

Menurut Hartono (2015: 254), ukuran perusahaan adalah: "... besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva".

Menurut Setiawan (2009: 165), ukuran perusahaan adalah: "... suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain. Dilihat dari sisi kemampuan memperoleh dana untuk ekspansi bisnis, perusahaan besar mempunyai akses yang besar ke sumber-sumber dana baik ke pasar modal maupun perbankan untuk membiayai investasinya dalam rangka meningkatkan labanya".

Menurut Riyanto (2008: 313), ukuran perusahaan adalah: "... menggambarkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva".

Menurut Husnan (2007: 45), ukuran perusahaan adalah: "... suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain, total aktiva *log size*, nilai pasar saham dan lain-lain".

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan, dan total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan.

2.1.2.4 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No.20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No.20 Tahun 2008 Pasal 1 (satu) adalah sebagai berikut:

1. "Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

Tabel 2.1

Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	>10 juta – 10 M	2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber: UU No.20 Tahun 2008 Pasal 1 (satu)

Kriteria diatas menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari sepuluh miliar rupiah dengan penjualan tahunan lebih dari lima puluh miliar rupiah.

2.1.2.5 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Harahap (2013: 23), menyatakan pengukuran ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total *asset*) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan

pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu”.

Menurut Jogiyanto Hartono (2013: 282), pengukuran perusahaan adalah: “Ukuran aktiva yang digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva”.

Dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Aktiva}$$

Sedangkan menurut Niresh dalam Rosyeni Rasyid (2014), ukuran perusahaan dapat diukur dengan total penjualan. Sebuah perusahaan diharapkan mempunyai penjualan yang terus meningkat, karena ketika penjualan semakin meningkat perusahaan dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi dengan begitu laba perusahaan akan meningkat yang selanjutnya akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Penjualan}$$

2.1.2.5.1 Definisi Aset

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) dalam Sukrisno Agoes (2013: 2), aset adalah: “... sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat

dari peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan”.

Menurut Kieso (2012: 16), yang diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto aset (*assets*) adalah: “... sumber daya yang dimiliki oleh suatu bisnis. Aset digunakan dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas seperti produksi, konsumsi, dan jual beli”.

Menurut Kasmir (2012: 39), aktiva adalah: “... harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu”.

Menurut Hery (2016: 4), aset adalah: “... manfaat ekonomi yang mungkin terjadi dimasa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dan transaksi atau peristiwa di masa lalu”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aset/aktiva adalah suatu elemen yang memiliki nilai manfaat ekonomis dan dapat diukur dan dilaporkan dimasa lalu hingga sekarang.

2.1.2.5.2 Jenis-jenis Aset

Jenis-Jenis aktiva menurut Kasmir (2016: 31), yaitu:

1. Aktiva lancar.

Aktiva lancar merupakan: “... harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan (ditunaikan) pada saat dibutuhkan dan paling lama satu tahun. Aktiva lancar merupakan aktiva yang paling *liquid* dari aktiva lainnya. Jika perusahaan membutuhkan uang untuk membayar sesuatu yang segera harus dibayar misalnya utang yang sudah jatuh tempo, atau pembelian suatu barang atau jasa, uang tersebut dapat diperoleh dari aktiva lancar. Komponen yang ada di aktiva lancar terdiri dari antara lain kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, sewa

dibayar di muka dan aktiva lancar lainnya. Penyusunan aktiva lancar ini biasanya dimulai dari aktiva yang paling lancar, artinya yang paling mudah untuk dicairkan”.

2. Aktiva tetap.
aktiva tetap merupakan: “... harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun. Secara garis besar aktiva tetap dibagi dua macam, yaitu: aktiva tetap yang berwujud (tampak fisik), seperti: tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lainnya, dan aktiva tetap yang tidak berwujud (tidak tampak fisik) merupakan hak yang dimiliki perusahaan, contoh: hak paten, merek dagang, *goodwill*, lisensi dan lainnya”.
3. Aktiva lainnya.
aktiva lainnya merupakan: “... harta atau kekayaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap. Komponen yang ada dalam aktiva lainnya adalah seperti: bangunan dalam proses, piutang jangka panjang, tanah dalam penyelesaian dan lainnya.

2.1.3 Earning Power

2.1.3.1 Definisi Laba

Menurut Harrison, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Gania (2012: 11), laba adalah: “... kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi (misalnya, kenaikan aset atau penurunan kewajiban) yang menghasilkan peningkatan ekuitas, selain yang menyangkut transaksi dengan pemegang saham”.

Menurut Harahap (2011: 309), laba akuntansi adalah: “... perbedaan antara *revenue* yang direalisasikan yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu”.

Menurut Mamduh M. Hanafi (2010: 32), laba adalah: “... ukuran suatu keseluruhan prestasi perusahaan yang didefinisikan: $Laba = Penjualan - Biaya$ ”.

Menurut Harrison, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Dian (2011: 3), keuntungan atau laba (*profit*) adalah: "... biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan guna menghasilkan barang atau jasa."

Menurut Zaky Baridwan (2010: 29), laba adalah: "... kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama satu periode yang termasuk dari pendapatan (*revenue*) atau investasi oleh pemilik.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih antara total pendapatan dan total beban usaha atau imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang atau jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang atau jasa).

2.1.3.2 Jenis-jenis Laba

Menurut Kasmir (2016: 303), dalam praktiknya laba terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Laba kotor (*gross profit*), adalah: "... laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
2. Laba bersih (*net profit*), adalah: "... laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak.

2.1.3.3 Definisi *Earning Power*

Sebelum manajer keuangan mengambil keputusan terlebih dahulu harus memahami kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan ini disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Disamping manajer keuangan (pihak *intern* perusahaan), beberapa pihak diluar perusahaan yang juga perlu memahami kondisi keuangan perusahaan adalah para (calon) pemodal, dan kreditur. kepentingan keduanya mungkin berbeda namun tujuan sama yaitu untuk memperoleh informasi dari laporan keuangan. Calon pemodal (pembeli saham) akan lebih berkepentingan dengan prospek keuntungan (laba) perusahaan guna untuk mengetahui investasi yang akan mereka dapatkan dimasa yang akan datang.

Pada umumnya salah satu aspek yang digunakan oleh pelaku pasar dalam menilai suatu perusahaan adalah kemampuan memperoleh laba (*earning power*).

Menurut Bambang Riyanto (2008: 37), *earning power* adalah: "... kemampuan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat besar kecilnya dalam menghasilkan laba".

Menurut Agus Sartono (2008: 125), *earning power* adalah: "... kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan".

Menurut Martono & D. Agus Harjitno (2005: 61), *earning power* adalah: "... *Earning power* yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba usaha dengan aktiva yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut".

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan *earning power* adalah kemampuan perusahaan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat besar kecilnya laba dengan aktiva yang digunakan.

2.1.3.4 Tujuan dan Manfaat *Earning Power*

Earning power memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Kasmir (2014: 197), tujuan *earning power* bagi perusahaan maupun bagi pihak luar usaha adalah sebagai berikut:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.

Sementara itu, menurut Kasmir (2014: 198), manfaat *earning power* yang diperoleh adalah:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.

Dapat disimpulkan tujuan dan manfaat *earning power* adalah untuk mengetahui besarnya tingkat laba, posisi laba perusahaan tahun sebelumnya, perkembangan laba dari waktu ke waktu besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri dan produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan.

2.1.3.5 Pengukuran *Earning Power*

Pada umumnya salah satu aspek yang digunakan oleh pelaku pasar dalam menilai prospek suatu perusahaan adalah kemampuan perusahaan tersebut dalam memperoleh laba (*earning power*). Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (*earning power*) menurut Bambang Riyanto (2008: 43), adalah: “Perhitungan *earning power* atas dasar suatu sistem analisa yang dimaksudkan untuk menunjukkan efisiensi perusahaan yang digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Tinggi rendahnya *earning power* dapat ditentukan oleh beberapa faktor yang bisa dilihat dari rasio keuangan, yaitu dengan profit margin dan persentase laba bersih dari nilai aktiva (ROA)”.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan pengukuran *earning power* adalah sebagai berikut:

- Persentase laba bersih dari nilai aktiva (ROA) yaitu, dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada besar kecilnya laba usaha dalam hubungannya dengan aktiva perusahaan.

Menurut Agus Sartono (2008: 123), *earning power* diukur dengan menggunakan:

Rumus *return on total asset* (ROA):

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

Menurut Kasmir (2016: 199), dalam praktiknya jenis-jenis *earning power* yang dapat digunakan adalah:

1. *Profit Margin on Sales* atau *Ratio Profit Margin* merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. cara pengukurannya dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih, terdapat dua rumus untuk mendapat *profit margin*, yaitu:

Untuk margin laba kotor dengan rumus:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{penjualan bersih} - \text{harga pokok penjualan}}{\text{sales}}$$

Untuk margin laba bersih dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Sales}}$$

2. ROA sering juga disebut dengan *Return On Investment* (ROI), merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva

yang tersedia didalam perusahaan. Secara sistematis ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Asset}}$$

3. ROE atau *rentabilitas* modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Secara sistematis ROE dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$ROE = \frac{\text{Earning After Interes Tax}}{\text{Equity}}$$

4. Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rsio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Laba Per Lembar Saham} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang beredar}}$$

2.1.4 *Corporate Governance*

2.1.4.1 *Definisi Corporate Governance*

Menurut Hadi Setia Tunggal (2013: 156), *corporate governance* adalah: “... proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, kreditur dan masyarakat sekitar”.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Hadi Setia Tunggal (2013: 149), *corporate governance* adalah: “...*the corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participants in the corporation, such us, the board managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance*”. “(sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan dan para stakeholdernya (para pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan). *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur dan perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja)”.

Price Waterhouse Coopers dalam Surya Yustiavandana (2006: 26), mendefinisikan bahwa *corporate governance* adalah: “... terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif, dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisiensi, dan efektif dalam mengelola resiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan *corporate governance* adalah suatu kebijakan dalam perusahaan yang mengelola, mengatur, dan mengawasi proses pengendalian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* dan untuk mencapai tujuan

perusahaan yaitu mensejahterakan para kepentingan baik itu internal maupun eksternal perusahaan”.

2.1.4.2 Definisi *Good Corporate Governance*

Cadbury Commite of United Kingdom dalam Agoes (2013: 101), mendefinisikan *Corporate Governance*, adalah: “... *the relationship between shareholders, managers, creditors, the govermen, employess, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.* (Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan ekstrnal lainnyayang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan)”.

Forum for Corporate Governance Indonesia atau FCGI (2001) dalam Agoes (2013), mendefinisikan *corporate governance* sebagai: “... Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan *intern* dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

Menurut Sukrisno Agoes (2013: 101), definisi *good corporate governance* adalah: “... suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran

direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya”.

Corporate Governance Perception Index (2011), mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai: “... proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku”.

Menurut Ardeno Kurniawan (2012: 27), *good corporate governance* adalah: “... seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham dan *stakeholder-stakeholder* lain seperti pegawai, kreditor dan masyarakat”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

2.1.4.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* diharapkan dapat dijadikan titik acuan bagi para pemerintah dalam membangun *framework* bagi penerapan *Good Corporate Governance*. Bagi pelaku usaha pasar modal, prinsip-prinsip ini dapat menjadi pedoman dalam kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi (2008: 38-41), mengemukakan lima prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu:

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
- c. Responsibilitas (*responsibility*), yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance*.
- d. Independensi (*independency*), yaitu untuk melancarkan pelaksanaan GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- e. Kesetaraan (*Fairness*), yaitu dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentinganlainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

2.1.4.4 Kriteria *Good Corporate Governance*

Menurut versi *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam Hery (2010: 6) ada lima kriteria dari *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. *The rights of shareholders.*
hak para pemegang saham terdiri dari hak untuk menerima informasi yang relevan mengenai perusahaan pada waktu yang tepat, mempunyai peluang untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan termasuk hak dalam hal pembagian keuntungan atau laba perusahaan. Pengendalian terhadap perusahaan haruslah dilakukan secara efisien dan setransparan mungkin.
2. *The equitable treatment of shareholders.*
Adanya perlakuan adil kepada seluruh pemegang saham, khususnya bagi para pemegang saham minoritas atau asing, yang terdiri dari hak atas pengungkapan yang lengkap mengenai segala informasi perusahaan yang material. Seluruh pemegang saham yang sama harus diperlakukan secara adil. Anggota *corporate board* dan manajer diharuskan mengungkapkan segala kepentingan yang material atas setiap transaksi perusahaan yang telah terjadi.
3. *The role of stakeholders in corporate governance.*
peran pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan haruslah diakui melalui penetapan secara hukum. Kerangka kerja GCG harus dapat mendorong kerja sama yang aktif antar pihak perusahaan dengan *stakeholders* demi menciptakan pekerjaan, kemakmuran, dan perusahaan yang sehat serta *financial*.
4. *Disclosure and transparency.*
adanya pengungkapan dan transparansi yang akurat dan tepat waktu atas segala hal yang material terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan, serta masalah lain yang berkaitan dengan karyawan dan *stakeholders*. Laporan keuangan haruslah diaudit oleh pihak yang independen dan disajikan berdasarkan standar kualitas tertinggi.
5. *The responsibilities of the board.*
kerangka kerja GCG harus menjamin adanya arahan, bimbingan, dan pengaturan yang strategis atas jalannya operasional maupun *financial* perusahaan, pemantauan dan pengawasan yang efektif oleh *corporate board* dan adanya pertanggung jawaban *corporate board* kepada perusahaan dan pemegang saham.

2.1.4.5 Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance

Menurut Hery (2013: 4), manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance*, yaitu sebagai berikut:

1. “*Good corporate governance* secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih

efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.

2. *Good corporate governance* dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum dan peraturan.
4. Membantu manajemen dan *corporate board* dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi”.

Surya dan Yustiavananda (2007) dalam Agoes (2013), tujuan dan manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah:

1. “Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum”.

2.1.4.6 Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Menurut Ardeno Kurniawan (2012: 43), unsur-unsur dalam *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah organ di dalam organisasi yang memfasilitasi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkenaan dengan investasinya di dalam organisasi. Keputusan yang diambil di dalam RUPS harus memiliki orientasi jangka panjang terhadap organisasi. RUPS tidak dapat mencampuri pelaksanaan tugas dan fungsi dewan direksi dan dewan komisaris. Pelaksanaan RUPS merupakan tanggungjawab dewan direksi.
2. Dewan Komisaris, adalah organ didalam oraganisasi yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada dewan direksi serta memastikan organisasi telah melaksanakan taat kelola organisasi dengan baik, termasuk didalamnya adalah implementasi sistem

manajemen risiko serta proses-proses pengendalian yang menjadi komponen dari sistem tata kelola organisasi yang baik. Agar dewan komisaris dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a. Komposisi dewan komisaris haruslah dibuat sedemikian rupa agar memiliki independensi serta dapat memberikan keputusan yang benar, tepat waktu, dan efektif.
 - b. Anggota dewan komisaris haruslah memiliki profesionalisme dalam bentuk integritas dan kapabilitas yang memadai sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsi yang dimilikinya dengan baik.
 - c. Fungsi pengawasan dan konsultasi dewan komisaris haruslah meliputi tindakan pencegahan, perbaikan dan suspensi.
3. Dewan Direksi, adalah organ di dalam organisasi yang bertanggungjawab atas pengelolaan organisasi. Setiap anggota dewan direksi menjalankan tugasnya dan membuat keputusan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, dewan direksi merupakan bagian dari manajemen yang akan bertugas mengurus organisasi.

2.1.4.7 Struktur *Corporate Governance*

Perwujudan *good corporate governance*, dimulai dengan struktur *governance*, berasal dari kata *gubernare*, *governance* berarti mengendalikan, memberi arahan, layaknya seorang nahkoda kapal. Dengan kata lain siapapun yang menjadi pelaku dalam struktur *governance* adalah seorang atau badan yang mampu memberikan arahan dan mengendalikan perusahaan agar tetap dikelola berdasarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2006).

2.1.4.8 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan.

Menurut Boediono (2005) ada beberapa mekanisme *corporate governance* yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manajemen laba, diantaranya adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas.

Kunci utama keberhasilan *good corporate governance* adalah membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang baik. Terwujudnya keseimbangan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan akan menjadi penghambat bagi manajer untuk membuat kebijakan sesuai kepentingan pribadi serta mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan.

Menurut Noor Laila (2011), mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok. Pertama berupa *internal mechanism* (mekanisme internal). Kedua, *eksternal mechanism* (mekanisme eksternal). *Internal mechanism* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan

struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris independen dan penemuan dengan *board or director*. Sedangkan *eksternal mecanishm* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal perusahaan seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian oleh pasar.

2.1.4.8.1 Kepemilikan Manajerial

2.1.4.8.1.1 Definisi Saham

Menurut Jogiyanto (2010: 67), saham adalah: "... suatu bentuk penjualan hak kepemilikan perusahaan kepada pihak lain".

Menurut Samsul (2006: 55), saham adalah: "... tanda bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Bukti suatu pihak disebut sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS). Pada umumnya DPS disajikan beberapa hari sebelum RUPS diselenggarakan dan setiap DPS dapat melihat DPS tersebut".

Menurut Fahmi dan Hadi (2011: 68), saham adalah:

1. "Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan.
2. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan di ikut dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
3. Persediaan yang siap untuk dijual".

Menurut Taufik Bintang (2012: 54), saham adalah: "... sebuah sertifikat kepemilikan atas perusahaan dan periode kepemilikan tergantung pemegang saham tersebut apakah dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan umumnya kepemilikan saham jangka panjang. Saham merupakan surat berharga, bukti hak kepemilikan investor atau sebuah perusahaan dan senioritasnya lebih rendah dari utang".

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa saham adalah bukti kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan dan merupakan alternatif sumber dana bagi perusahaan penerbit saham.

2.1.4.8.1.2 Jenis-jenis Saham

Menurut Fahmi dan Hadi (2011: 68), pada umumnya saham dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Saham biasa (*common stock*), adalah: "... suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa serta berhak untuk menentukan membeli *right issue* (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya diakhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden".
2. Saham preferen (*preferred stock*), adalah: "... suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulanan)".

2.1.4.8.1.3 Definisi Kepemilikan Manajerial

Menurut Halim (2007: 1-2), kepemilikan di dalam perusahaan adalah: "... dibuktikan dengan lembar saham biasa. Setiap lembar saham menyatakan pemiliknya memiliki $1/n$ dari saham perusahaan, dimana "n" menunjukkan jumlah lembar saham yang dikeluarkan. Untuk tujuan manajemen keuangan, kekayaan pemegang saham dinyatakan dengan harga pasar per lembar saham dari perusahaan yang bersangkutan".

Menurut Wulandari (2011: 26), kepemilikan saham manajerial adalah: "... kepemilikan saham oleh manajemen laba mengurangi *agency* problem diantara manajer dan pemegang saham, yang dapat dicapai melalui penyelarasan kepentingan diantara pihak-pihak yang berbenturan kepentingan. Disisi lain, manajer yang memiliki saham perusahaan dalam porsi yang besar memiliki lebih banyak intensif untuk mengutamakan kepentingan sendiri dari pada kepentingan semua pemegang saham.

Menurut Jensen dan Meckling dalam Kawatu (2009: 408), kepemilikan manajerial adalah: "... saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenanan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik juga. Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta

menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah”.

Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam Agustiani (2013), kepemilikan manajerial adalah: “... para manager saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan pada suatu perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Imanta dan Satwiko (2011: 68), kepemilikan manajerial adalah: “... kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer sekaligus sebagai pemegang saham”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham yang dikelola.

2.1.4.8.1.4 Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Pengukuran kepemilikan manajerial menurut Jansen dan Meckling dalam Kawastu (2009: 408), yaitu:

$$\frac{\sum \text{saham yang dimiliki manajer dan dewan komisaris}}{\sum \text{seluruh saham perusahaan}} \times 100\%$$

Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba

yang kurang berkualitas bisa terjadi karena dalam menjalankan bisnis perusahaan, manajemen bukan merupakan pemilik perusahaan. Pemisahan kepemilikan ini akan dapat menimbulkan konflik dalam pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan para manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan para pemilik. Konflik yang terjadi akibat pemisahan kepemilikan ini disebut dengan konflik keagenan.

2.1.4.8.2 Kepemilikan Institusional

2.1.4.8.2.1 Definisi Kepemilikan Institusional

Menurut Jensen dan Meckling dalam Kawastu (2009: 408), kepemilikan institusional adalah: "... saham perusahaan yang dimiliki oleh instansi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Investor institusional sering disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated*) sehingga seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memproduksi laba masa depan dibanding investor *non institutional*. Investor institusional diyakini mampu memonitor tindakan manajer dengan lebih baik dibanding dengan investor individual.

Menurut Nuraina (2012: 116), kepemilikan institusional adalah: "... persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiunan atau perusahaan lainnya)".

Menurut Bodie (2006), kepemilikan institusional adalah: "... pemisahan kepemilikan antara pihak *outsider* dengan pihak *insider*. Jika dalam suatu perusahaan memiliki banyak pemilik saham, maka kelompok besar individu tersebut sudah jelas tidak dapat berpartisipasi dengan aktif dalam manajemen perusahaan sehari-hari".

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dari seluruh jumlah modal saham perusahaan yang dikelola.

2.1.4.8.2.2 Pengukuran Kepemilikan Institusional

Pengukuran kepemilikan institusional menurut Jansen dan Meckling dalam Kawatu (2009: 408), yaitu:

$$\frac{\sum \text{saham institusional perusahaan}}{\sum \text{seluruh saham perusahaan}} \times 100\%$$

Adanya kepemilikan institusional dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya, maka tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan. Menurut Permanasari (2010) kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

1. Memiliki *profesionalisme* dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.

2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi didalam perusahaan.

2.1.4.8.3 Dewan Komisaris Independen

2.1.4.8.3.1 Definisi Dewan Komisaris Independen

Menurut Widjaja (2009: 79), dewan komisaris independen adalah: "... anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lainnya".

Menurut Fakhruddin (2008: 102), dewan komisaris adalah: "... anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan".

Menurut Nuryaman (2008: 5), komposisi dewan komisaris adalah: "... susunan keanggotaan yang terdiri dari komisaris dari luar perusahaan (komisaris independen) dan komisaris dari dalam perusahaan. Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen dan memberikan nasihat kepada manajemen. Proporsi dewan komisaris independen dihitung dengan membagi jumlah dewan komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan suatu perusahaan, tidak memiliki jabatan rangkap di perusahaan lain yang terafiliasi dengan suatu perusahaan dan memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

2.1.4.8.3.2 Pengukuran Dewan Komisaris Independen

Menurut Widjaja (2009: 82), pengukuran dewan komisaris independen adalah sebagai berikut: “Dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris”.

Berdasarkan uraian di atas, rumus perhitungan dewan komisaris independen sebagai berikut:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{total anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Menurut Robert Jao (2011), komposisi dewan komisaris independen diukur sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{anggota komisaris luar perusahaan}}{\text{seluruh komisaris perusahaan}} \times 100\%$$

2.1.4.8.4 Komite Audit

2.1.4.8.4.1 Definisi Komite Audit

Menurut James A Hall dialihbahasakan oleh Dewi (2007: 16), komite audit adalah: "... pemeriksa dan penyeimbang yang independen untuk fungsi audit internal dan perantara dengan para auditor eksternal".

Menurut Komite Nasional kebijakan *Governance* (2006), dalam pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, komite audit adalah: "... sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau jumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen".

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 seperti yang dikutip oleh Nasution dan setiawan (2007:7-8), komite audit adalah: "... komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit yang bertanggungjawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi auditor eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal".

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang membantu dewan komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektifitas internal dan eksternal audit.

2.1.4.8.4.2 Pengukuran Komite Audit

James A Hall dialihbahasakan oleh Dewi (2007: 20), menyatakan bahwa: “Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit diperusahaan”.

Berdasarkan uraian diatas, rumus perhitungan komite audit adalah sebagai berikut:

$$KA = \sum \text{Anggota Komite Audit diperusahaan.}$$

2.1.4.8.5 Ukuran KAP

2.1.4.8.5.1 Definisi Ukuran KAP

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/Pmk.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya”.

Sedangkan Akuntan Publik itu sendiri adalah: “... akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini”.

Menurut Cameran (2005) dalam Eli Suhayati (2012) menyatakan bahwa reputasi KAP sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan, ketika kantor akuntan yang bereputasi baik diperkirakan dapat melakukan audit lebih efisien

dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal. Menurut Eli Suhayati (2012) auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik besar dipandang sebagai auditor yang bereputasi tinggi. KAP yang memiliki reputasi baik umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor, fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan) dibandingkan dengan KAP yang reputasinya kurang baik.

Menurut Sanjaya (2008) hasil audit tidak bisa diamati secara langsung sehingga pengukuran variabel kualitas auditor menjadi sulit untuk dioperasionalkan. Untuk mengatasi permasalahan ini, para peneliti terdahulu kemudian mencari indikator pengganti dari kualitas auditor. Dimensi kualitas auditor yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah ukuran akuntan public atau KAP karena nama baik perusahaan (KAP) dianggap merupakan gambaran yang paling penting.

2.1.4.8.5.2 Pengukuran Ukuran KAP

Ada 4 (empat) KAP terbesar di Amerika Serikat yang disebut KAP internasional dengan julukan *The Big Four*. Masing-masing KAP tersebut memiliki kantor di setiap kota besar di Amerika Serikat dan kota-kota besar lainnya di seluruh dunia, termasuk Indonesia. *The Big Four* di Indonesia menurut Indah, Adri dan Elfi (2014) diwakili kepentingannya oleh KAP di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. KAP *Price Water house Coopers* (PWC), bekerjasama dengan KAP Drs.Hadi Sutanto & Rekan, Haryanto Sahari & Rekan.
2. KAP *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG), bekerjasama dengan KAP Sidharta-Sidharta dan Widjaja.
3. KAP *Ernest & Young* (E&Y), bekerjasama dengan KAP Purwantono, Sarwoko & Sanjadja.
4. KAP Hans Tuanakotta & Mustofa, Osman Ramli Satrio & Rekan.

Untuk variabel ini akan diukur dengan cara auditor perusahaan yang termasuk KAP Big Four diberi nilai 1 sedangkan KAP *Non Big Four* diberi nilai 0.

2.1.5 Manajemen Laba

2.1.5.1 Definisi Manajemen Laba

Menurut Schipper dalam Sri Sulistyanto (2008: 49), manajemen laba adalah: “... *the external financial reporting process, with the intent of obtaining some private gain apposed to say, merely facilitating the neutral operation of the process*”. (Pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses)”.

Menurut Lewitt dalam Sri Sulistyanto (2008: 50), manajemen laba adalah: “... *in accounting allows it to keep pace with business innovations. Abuses such as*

earnings occur actual financial volatility. This in turn, make the true consequences of management decisions (Manajemen laba adalah fleksibilitas akuntansi untuk menyetarakan diri dengan inovasi bisnis. Penyalahgunaan laba ketika publik memanfaatkan hasilnya. Penipuan mengaburkan volatilitas keuangan sesungguhnya. Itu semua untuk menutupi konsekuensi dari keputusan-keputusan manajer”).

Menurut *National Association of Certified Fraud Examiners* dalam Sri Sulistyanto (2008: 49), manajemen laba adalah: “... *the intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data, which is misleading and, when considered with all the information made available, should cause the reader to change or alter his or judgement or decision* (Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan yang menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya”).

Menurut Scoot (2009: 403) dalam Robert Jao (2011), manajemen laba adalah: “... tindakan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi atau tindakan yang mempengaruhi laba sehingga dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam pelaporan laba”.

Menurut Ahmed Riahai dan Belkaoui (2007: 201), manajemen laba adalah: "... potensi penggunaan manajerial akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi".

Menurut Sulistyanto (2008: 6), Manajemen laba adalah: "... upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan".

Menurut Dwi Martani (2012: 113), manajemen laba adalah: "... tindakan mengatur waktu pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian agar mencapai informasi laba tertentu yang diinginkan, tanpa melanggar ketentuan standar akuntansi".

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah usaha manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dengan sengaja dalam batasan yang dibolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi laporan keuangan untuk kepentingan manajer".

2.1.5.2 Permainan Manajerial

Menurut Sri Sulistyanto (2008: 33-36), ada beberapa cara yang dipakai perusahaan untuk mempermainkan besar kecilnya laba, yaitu dengan mengakui dan mencatat pendapatan terlalu cepat atau sebaliknya, mengakui dan mencatat pendapatan palsu, mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lebih lambat dari yang seharusnya, dan tidak mengungkapkan kewajibannya. Upaya

mempermainkan besar kecilnya komponen laporan keuangan ini sulit untuk dideteksi dan diketahui oleh pemakai informasi keuangan, meskipun laporan keuangan menyertakan catatan yang menjelaskan secara rinci komponen-komponen dalam laporan itu. Ada enam permainan manajerial diantaranya:

1. Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih. Upaya ini dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat pendapatan periode-periode yang akan datang atau pendapatan yang secara pasti belum dapat ditentukan kapan dapat terealisasi sebagai pendapatan periode berjalan (*current revenue*). Hal ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar daripada pendapatan sesungguhnya. Meningkatnya pendapatan ini membuat laba periode berjalan juga menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya.
2. Mengakui pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih. Upaya ini dilakukan mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode sebelumnya. Pendapatan periode berjalan menjadi lebih kecil daripada pendapatan sesungguhnya. Semakin kecil pendapatan akan membuat laba periode berjalan juga akan menjadi semakin kecil dari pada laba sesungguhnya. Akibatnya kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih buruk atau kecil bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan investor agar menjual sahamnya (*management buyout*), mengecilkan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah, dan menghindari kewajiban dan pembayaran hutang.
3. Mencatat pendapatan palsu. Upaya ini dilakukan manajer dengan mencatat pendapatan dari suatu transaksi yang sebenarnya tidak pernah terjadi sehingga pendapatan ini juga tidak akan pernah terealisasi sampai kapanpun. Upaya ini mengakibatkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih besar daripada pendapatan sesungguhnya. Meningkatnya pendapatan ini membuat laba periode berjalan juga menjadi lebih besar daripada laba sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya.
4. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lambat. Upaya ini didapat dilakukan manajer mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan (*current cost*). Upaya semacam ini membuat biaya periode berjalan menjadi lebih besar daripada biaya sesungguhnya. Akibatnya, kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih buruk atau kecil bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya.

5. Mengakui dan mencatat biaya lebih hemat.
Upaya ini dapat dilakukan dengan mengakui biaya periode berjalan menjadi biaya periode sebelumnya. Hingga periode berjalan menjadi lebih kecil daripada biaya sesungguhnya. Akibatnya, membuat kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih baik atau lebih besar bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya.
6. Tidak mengungkapkan semua kebaikan.
Upaya ini dapat dilakukan manajer dengan cara menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya sehingga kewajiban periode berjalan menjadi lebih kecil daripada kewajiban sesungguhnya. Akibatnya, membuat kinerja perusahaan untuk periode berjalan seolah-olah lebih bagus bila dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Upaya semacam ini dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan investor agar mau membeli saham yang ditawarkannya, menghindari kebijakan multi papan dan sebagainya.

2.1.5.3 Motivasi Manajemen Laba

Ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dalam menyusun laporan keuangan dalam Sri Sulistyanto (2008: 63), diantaranya:

1. *Bonus Plan Hypotesis.*
menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan manajerial.
2. *Debt (equity) hypothesis.*
menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar kewajiban utang piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi

keliru juga. Akibatnya terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumberdaya.

3. *Political cost hypothesis*.

menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Manajer akan memperlakukan laba agar kewajiban pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba sesuai dengan kemauan perusahaan.

2.1.5.4 Pola dan Teknik Manajemen Laba

Pola manajemen laba dalam Sri Sulistyanto (2008: 177), antara lain: kenaikan laba (*income increasing*), penurunan laba (*income decreasing*), dan perataan laba (*income smoothing*).

Pola kenaikan laba (*income increasing*) merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi dari pada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi dari pada pendapatan sesungguhnya dan biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.

Pola penurunan laba (*income decreasing*) merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.

Pola perataan laba (*income smoothing*) merupakan upaya perusahaan mengatur agar labanya efektif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan

dengan mempermainkan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya.

Teknik manajemen laba menurut Setiawati dan Na'im (2005), dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi.
Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgement* (perkiraan) terhadap estimasi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.
2. Mengubah metoda akuntansi.
Perubahan metoda akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh merubah metoda depresisi aktiva tetap, dari metoda depresiasi angka tahun ke metoda depresiasi garis lurus.
3. Menggeser perioda biaya atau pendapatan.
Contoh rekayasa perioda biaya atau pendapatan antara lain mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada perioda akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

2.1.5.5 Metode Manajemen Laba

Metode yang digunakan untuk pendeteksian manajemen laba ini mengikuti model yang dikembangkan oleh Jones (1991) yang dikenal sebagai (*Modified Jones Model*), yang merupakan modifikasi dari *Jones Model*.

Menurut Sri Sulistyanto (2008: 225), menyatakan bahwa:

“Model Jones Modifikasi (*Modified Jones Model*) merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk

menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accrual* ketika *discretion* melebihi pendapatan.”

Menurut Sri Sulistyanto (2008: 225), langkah-langkah yang dilakukan dalam perhitungan *discretionary accruals* (DTA), yaitu:

1. Menghitung nilai total akrual (TAC)

$$TAC = Net\ Income - Cash\ Flow\ From\ Operations$$

2. Menghitung nilai *current accruals* yang merupakan selisih antara perubahan (D) aktiva lancar (*current assets*) dikurangi dengan kas, dengan perubahan utang lancar (*current liabilities*) dikurangi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo (*current maturity of long-term debt*).

$$Current\ Accruals = D (current\ Assets - Cash) - D (Current\ Liabilities - Current\ maturity\ of\ Long\ Term\ Debt)$$

3. Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus di atas terlebih dahulu melakukan regresi linier sederhana terhadap $\frac{CurrAcc_{i,t}}{TA_{i,t}}$ sebagai variabel dependen serta $\frac{1}{TA_{i,t}}$ dan $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t}}$ sebagai variabel independennya.

$$\frac{CurrAcc_{i,t}}{TA_{i,t}} = \alpha_1 \left[\frac{1}{TA_{i,t}} \right] + \alpha_2 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t}} \right] + \sum$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketika variabel itu akan memperoleh koefisien dari variabel independen, yaitu α_1 dan α_2 yang di masukan dalam persamaan dibawah ini untuk menghitung nilai *nondisrectionary accruals*.

$$\frac{CurrAcc_{i,t}}{TA_{i,t}} = \alpha_1 \left[\frac{1}{TA_{i,t}} \right] + \alpha_2 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t}} \right] + \Sigma$$

Keterangan :

$NDAC_{it}$ = *Nondisrectionary current accruals* perusahaan *i* periodet

α_1 = *Estimated intercept* perusahaan *i* periode *t*

α_2 = *Slope* untuk perusahaan *i* periodet

$TA_{i,t-1}$ = *Total assets* untuk perusahaan *i* periode *t*

$\Delta Sales_{i,t}$ = Perubahan penjualan perusahaan *i* periode *t*

$\Delta TR_{i,t}$ = Perubahan dalam piutang dagang perusahaan periode *t*

4. Menghitung nilai *disrectionary current accruals*, yaitu *desrectionary accreuals* yang terjadi dari komponen-komponen aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan rumus sebagai berikut:

$$DCA_{i,t} = \frac{CurrAcc_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - NDCA_{i,t}$$

Keterangan :

$DCA_{i,t}$ = *Disrectionary current accruals* perusahaan *i* periode *t*

$CurrAcc_{i,t}$ = *Current Accruals* perusahaan *i* periode *t*

$TA_{i,t-1}$ = Total aktiva perusahaan *i* periode *t*

$NDCA_{i,t}$ = *Nondisrectionary current accruals* perusahaan *i* periode *t*

5. Menghitung nilai *nondisrectionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linier sederhana terhadap $\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel dependennya serta $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$, $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$, dan $\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$ sebagai variabel independennya.

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = \hat{b}_0 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + \hat{b}_1 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \hat{b}_2 \left[\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \Sigma$$

Dengan melakukan regresi terhadap ketiga variabel itu akan diperoleh koefisien dari variabel independen yaitu b_1 , b_2 dan b_3 yang akan dimasukkan dalam persamaan dibawah ini untuk menghitung nilai *nondisrectionary accruals*.

$$NDA_{i,t} = \hat{b}_0 \left[\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + \hat{b}_1 \left[\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \hat{b}_2 \left[\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right]$$

Keterangan :

\hat{b}_0 = *Estimated intercept* perusahaan i periode t

\hat{b}_1, \hat{b}_2 = *Slope* untuk perusahaan i periode t

$PPE_{i,t}$ = Aktiva tetap (*Gross property, plant, and equipment*) perusahaan I periode t

6. Menghitung nilai *disrectionary accruals*, *disrectionary long-term accruals*, dan *nondisrectionary long-term accruals*. *Disrectionary accruals* (DTA) merupakan selisih total akrual (TAC) dengan *nondisrectionary accruals* (NDA). *Disrectionary long-term accruals* (DLTA) merupakan selisih

disrectionary accruals (DTA) dengan *disrectionary current accruals* (DCA), sedangkan *nondisrectionary long-term accruals* (NDLTA) merupakan selisih *nondisrectionary accruals* (NDTA) dengan *nondisrectionary current accruals* (NDCA).

Sedangkan Muid (2005) menyatakan untuk mendeteksi apakah perusahaan melakukan manajemen laba dalam laporan keuangannya maka digunakan rumus *total accruals*, dengan menggunakan persamaan:

$$TAC_{PT} = NOI_{PT} - CFFO_{PT}$$

TAC_{PT} : *Total Accruals* pada periode tes.

NOI_{PT} : *Net Operating Income* pada periode tes.

$CFFO_{PT}$: *Cash Flow from Operations* pada periode tes

Total *accrual* terdiri dari *discretionary* dan *non-discretionary accruals*. Total *accruals* digunakan sebagai indikator, sebab *discretionary accruals* (DAC) sulit untuk diamati, karena ditentukan oleh kebijakan masing-masing manajer. Menurut Sri Sulistyanto (2008: 165) Manajemen laba dapat diukur dengan *discretionary accrual*. Dalam penelitian ini *discretionary accrual* digunakan sebagai proksi karena merupakan komponen yang dapat dimanipulasi oleh manajer seperti penjual.

Muid (2005) merumuskan dalam persamaan sebagai berikut

$$DAC_{PT} = (TAC_{PT} / Sales_{PT}) - (TAC_{PD} / Sales_{PD})$$

PT : Periode Tes

PD : Periode Dasar

Adanya manajemen laba ditandai dengan DAC positif dan apabila DAC bernilai negatif berarti tidak terdapat manajemen laba.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2008), dalam teori akuntansi positif memaparkan *the political cost hypothesis*. Hipotesis ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan digunakan sebagai pedoman biaya politik dan biaya politik akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran dan risiko perusahaan. Dalam teori ini perusahaan yang besar memiliki motivasi untuk melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba guna menurunkan biaya politik. Sebaliknya, perusahaan kecil berupaya meningkatkan laba.

Teori ini didukung oleh penelitian Halim (2010) yang menyatakan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi manajemen laba dimana semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar juga kesempatan manajemen untuk melakukan manajemen laba. Selain itu semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan juga semakin dituntut untuk memenuhi ekpektasi investor yang tinggi.

Rahmawati dan Baridwan (2006) dalam Nasution dan Setiawan (2007) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan kapitalisasi pasar berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba perusahaan. Manajer perusahaan besar mendapat insentif yang lebih besar ketika mereka melakukan manajemen laba untuk mengurangi biaya politiknya.

Merujuk pada penelitian Rahmawati dan Baridwan (2006) dalam Nasution dan Setiawan (2007) variabel ukuran perusahaan pada penelitian ini diukur menggunakan *market capitalization*. Berdasarkan konsep *the political cost hypothesis* dalam teori akuntansi positif dan penelitian terdahulu, maka penelitian ini memprediksi ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Halim (2010), dan Rahmawati dan Baridwan (2006) dalam Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan positif terhadap manajemen laba.

2.2.2 Pengaruh *Earning Power* terhadap Manajemen Laba

Pada umumnya salah satu aspek yang digunakan oleh pelaku pasar dalam menilai prospek suatu perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (*earning power*).

Stice dan Skousen yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar (2009: 419), mengemukakan bahwa: “Laba bersih yang dilaporkan merupakan angka yang memperoleh perhatian paling banyak, maka angka ini pulalah yang paling mungkin dimanipulasi oleh para manajer, alasan tersebut benar-benar

mencerminkan kekuatan yang seringkali bisa dikatakan sebagai pendorong para manajer untuk memanipulasi laba yang dilaporkan”.

Selain pernyataan-pernyataan di atas, juga terdapat hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008), mengemukakan adanya pengaruh *earning power* terhadap praktik manajemen laba bahwa: “*Earning power* perusahaan dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba baik dengan cara menerapkan kebijakan *incomeincreasing accrual* ataupun *decreasing accrual*. Hal ini tergantung dari motivasi masing-masing perusahaan. Meskipun demikian pengaruh tersebut cenderung lemah”.

Menurut Boediono (2005), *Earning power* sering digunakan oleh para investor dalam menilai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan besar kecilnya laba perusahaan, hal itu menjadikan motivasi kepada pihak manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba yang dapat memberikan keuntungan pribadi dan juga nilai pasar perusahaan.

Menurut Perdana (2012) semakin besar perubahan *earning power* menunjukkan semakin besar fluktuasi kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba. Hal ini mempengaruhi investor dalam memprediksi laba dan memprediksi resiko dalam investasi sehingga memberikan dampak pada kepercayaan investor terhadap perusahaan. Sehubungan dengan itu, manajemen termotivasi untuk melakukan manajemen laba agar laba yang dilaporkan tidak berfluktuatif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Hal ini tercermin dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008), dan Ali Akbar (2009) dan Boediono (2005) menyatakan bahwa *earning power* mempunyai hubungan positif terhadap manajemen laba.

2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba

Menurut Boediono (2005), dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria: (1) perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik (*owner manager*) dan (2) perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan bukan pemilik (*non ownersmanager*). Dua kriteria ini akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola.

Teori keagenan (*agency theory*) memunculkan argumentasi terhadap adanya konflik antara pemilik yaitu pemegang saham dengan para manajer. Konflik tersebut muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak. Laila (2011), menyatakan bahwa: "... kepemilikan saham yang besar dari nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor".

Banyak hal yang memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba. Menurut Scoot (2005) dalam Nugraha (2010), salah satu motivasi terjadinya manajemen laba yaitu *bonus purpose*, manajer termotivasi mengelola laba untuk mencapai target kinerja dan kompensasi bonus dengan bertindak secara *oportunistik*.

Ross *et al* (1999) dalam Restu Agusti (2009), menyatakan bahwa “Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingannya sendiri. Semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya manajemen laba”.

Boediono (2005) menyatakan bahwa: “Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen tinggi, maka intensif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat”.

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai kepemilikan manajerial dengan manajemen laba. Menurut Kusumawardhani (2012) dan Boediono (2005), menyatakan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai hubungan positif terhadap manajemen laba.

2.2.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Pemegang

saham institusional biasanya berbentuk entitas seperti perbankan, asuransi, dana pensiun dan reksadana. Investor institusional memiliki kapabilitas untuk menganalisis laporan keuangan secara langsung dibandingkan investor individual.

Menurut Widyastuti (2009) mengemukakan bahwa: “semakin tinggi persentase kepemilikan institusional maka semakin besar pula kecenderungan pihak manajer dalam mengambil kebijakan akuntansi tertentu untuk manipulasi pelaporan laba”.

Menurut penelitian serupa ditemukan oleh Ujianto dan Pramuka (2007) mengatakan bahwa kepemilikan institusional adalah pemilik yang lebih memfokuskan pada *current earning*, akibatnya pihak manajemen dapat saja terpicu melakukan tindakan manajemen yang akan meningkatkan laba jangka pendek, misalnya dengan cara melakukan manipulasi laba.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2009), dan Ujianto dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai hubungan positif terhadap manajemen laba.

2.2.5 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Secara umum dewan komisaris independen ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris independen

diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris independen tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan komisaris independen bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris.

Robert Jao (2011) menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*. Pernyataan ini diperkuat oleh I Gusti Ayu (2011) yang menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme *corporate governance* yang penting dan akan memiliki kinerja yang lebih efektif apabila ukurannya kecil.

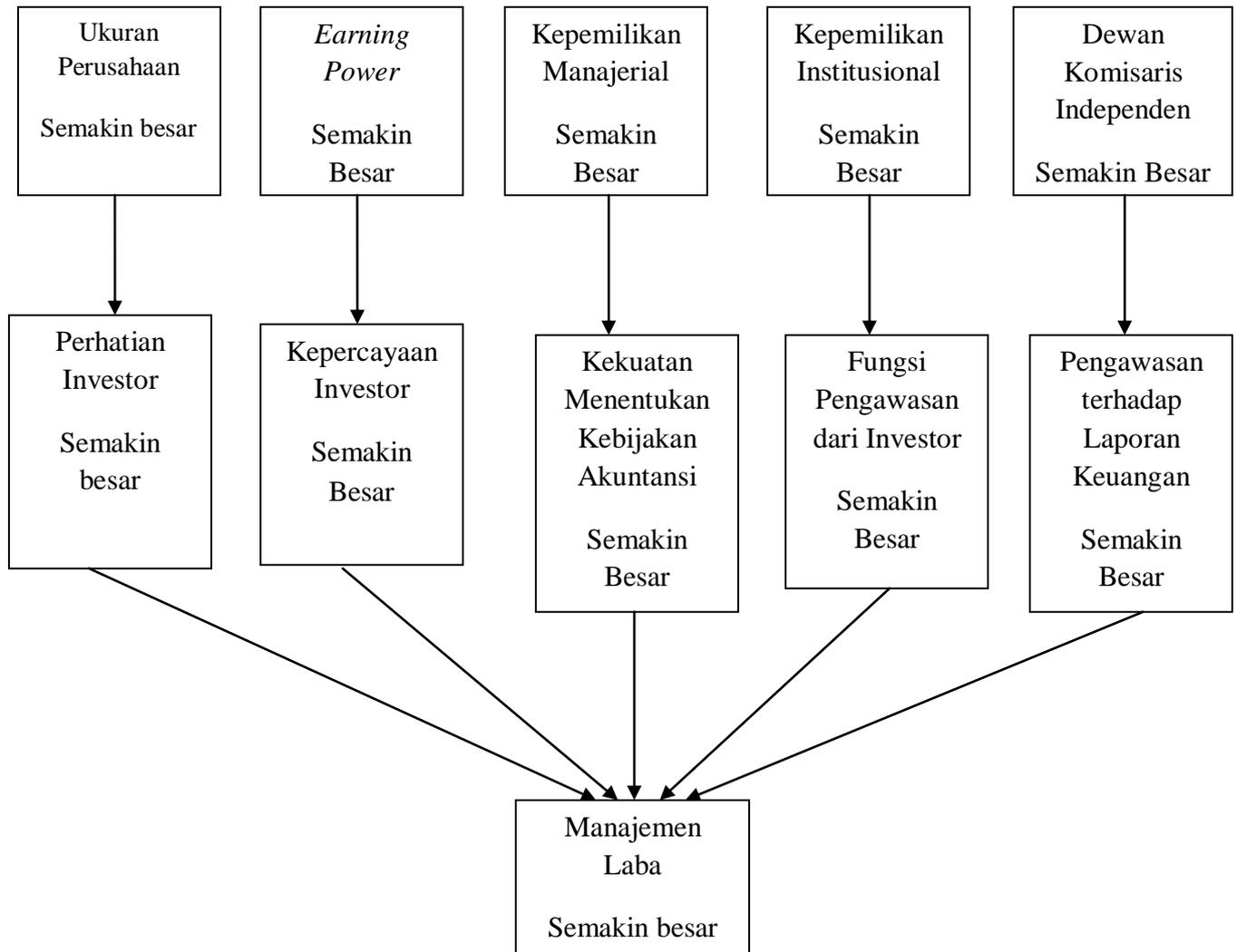
Penelitian ini diperkuat oleh I Gusti Ayu (2011) yang menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dengan ukuran dewan komisaris yang besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya sehingga mengakibatkan kinerja perusahaan menurun. Menurut Nasution dan Setiawan (2007), makin banyaknya dewan komisaris akan memunculkan kesulitan dalam menjalankan peran dari dewan komisaris sendiri diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang penting bagi perusahaan.

Nasution dan Setiawan (2007), menyatakan bahwa dewan komisaris yang berukuran besar memberikan efek yang berbeda terhadap tindakan manajemen

laba. Ukuran dewan komisaris yang besar menyebabkan pengendalian terhadap manajemen menjadi kurang efektif sehingga manajemen memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan laba.

Semakin besar ukuran dewan komisaris menyebabkan semakin lemahnya pengawasan terhadap manajemen sehingga semakin banyak tindakan manajemen laba yang dilakukan. Merujuk pada hasil penelitian Nasution dan Setiawan (2007), I Gusti Ayu (2011) dan Robert Jao (2011), maka penelitian ini memprediksi ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Kerangka pemikiran yang diajukan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 93), pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan model kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
- H2 : *Earning Power* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
- H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
- H4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
- H5 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.